



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340-INDONESIA
Telp.+62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

865
Rakala

Nomor : B-0444/SESMENKO/KP-03/V/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
dan Pratama di Lingkungan Kemenko Marves

11 Mei 2023

Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
2. Sekretaris Daerah Provinsi.

di-

Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kami mengundang Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara mengenai seleksi dimaksud. Selanjutnya informasi persyaratan dan tahapan seleksi dapat diakses melalui *website* <https://maritim.go.id/registrasi>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi,



Ayodhia G. L. Kalake
Ayodhia G. L. Kalake

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

15 MAY 2023

0002166

Lampiran Surat

Nomor : B-0444/SESMEKNO/KP-03/VI/2023

Tanggal : 11 Mei 2023

- A. Sekretaris Kementerian Koordinator/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
 8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
 14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
 15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
 16. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 19. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 25. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 26. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 27. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 28. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf);
 29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 31. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
 32. Sekretaris Utama Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

B. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;

C. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Sekretaris Jenderal Ombudsman;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

D. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN);
4. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla);
5. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);
6. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
7. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
8. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
9. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
10. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
12. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
13. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
14. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
15. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
16. Sekretaris Utama Badan Pertahanan Nasional (BPN);
17. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
18. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
19. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas);
20. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
21. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN);
22. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
23. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
24. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
25. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
26. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS);
27. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
28. Sekretaris Utama Lembaga Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);

E. Sekretaris Daerah Provinsi

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

10. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.